

KONSTRUKSI MASYARAKAT SEKITAR PONDOK PESANTREN BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS TENTANG KEMENANGAN HJ. MUNDJIDAH WAHAB SEBAGAI BUPATI DALAM PILKADA JOMBANG 2018

Ainun Ikromin

15040254064 (PPKn, FISH, UNESA) ainunikromin@mhs.unesa.ac.id

Oksiana Jatningsih

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) oksianajatningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan konstruksi masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras tentang pemimpin perempuan dan kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Informan dalam penelitian ini berjumlah Sembilan orang, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan dengan *purposive sampling*. Penelitian bertempat di Dusun Tambak Beras Jombang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, partisipasi pasif dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Fokus dari penelitian ini adalah pandangan individu terhadap pemimpin perempuan serta tanggapan individu tentang kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras mengonstruksi patriarki untuk pemimpin dengan landasan pemahaman agama yang didapatkan serta budaya yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L Berger, yang menjelaskan bahwa konstruksi sosial akan muncul dengan adanya tiga moment dialektika yaitu *eksternalisasi*, *obyektivasi* dan *internalisasi*. Berdasarkan analisis, kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati tidak mencerminkan terjadinya perubahan pandangan gender. Penguatan nilai gender patriarki didapatkan melalui pembelajaran agama di sekolah dan pengajian yang ada di masyarakat. Kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati dilandasi oleh status tinggi yang dimiliki sebagai anak kyai dan pendiri Nahdlatul Ulama.

Kata Kunci : PILKADA, Bupati Jombang, Perempuan, Patriarki, Masyarakat sekitar Pondok Pesantren.

Abstract

The purpose of this study was to reveal the construction of the community around the Bahrul Ulum Tambak Beras Islamic boarding school about female leaders and the victory of Hj. Mundjidah Wahab as regent of Jombang. This study used a qualitative approach with phenomenological design. The informants in this study were nine people, researchers used informant selection techniques with purposive sampling. The study took place in Tambak Beras, Jombang. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, passive participation and documentation. While for the data validity technique using source triangulation and technique triangulation. The focus of this study was the individual's views on female leaders as well as individual responses to the victory of Hj. Mundjidah Wahab as regent. The results of the study revealed that the community around the Bahrul Ulum Tambak Beras Islamic boarding school constructed patriarchy for leaders on the basis of the understanding of religion obtained as well as the culture that runs in the community. This research used social construction theory from Peter L Berger, which explained that social construction will emerge with the existence of three dialectical moments namely externalization, objectivation and internalization. Based on the analysis, the victory of Hj. Mundjidah Wahab as regent did not reflect the change in gender views. Strengthening patriarchy gender values is obtained through religious learning in schools and recitation in the community. Hj victory. Mundjidah Wahab as regent was based on the high status possessed as a cleric child and founder of the Nahdlatul Ulama.

Keywords: Election, The Regent of Jombang, Woman, Patriarchy, Community around the Islamic Boarding School.

PENDAHULUAN

Fenomena kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati di Jombang merupakan suatu hal yang unik apabila dikaitkan dengan adanya konstruksi gender patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas, bahkan arena politik dianggap sebagai

dunia yang keras, sarat dengan persaingan bahkan terkesan sangat ambisius (Sihite, 2007:158). Pandangan patriarki merupakan satu dari sekian pandangan yang berjalan dalam kehidupan manusia di masyarakat.

Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat menjadi sebuah pandangan yang kental akan diskriminasi. Perempuan distereotipekan sebagai sosok yang lemah, cengeng, dan berpikiran tidak rasional. Sedangkan laki-laki yang distereotipekan sebagai sosok

kuat, cerdas dan berpikir rasional. Dengan pandangan tersebut, maka munculah konsep feminin dan maskulin. Masyarakat seolah mengharuskan perempuan untuk berperilaku sebagaimana konsep feminin, sedangkan konsep maskulin yang telah dikonstruksikan masyarakat sebagai konsep yang melekat pada laki-laki.

Dengan adanya konsep feminin dan maskulin mengharuskan perempuan dan laki-laki melakukan sesuai dari pandangan tersebut. Apabila perempuan dan laki-laki tidak melakukan menurut konsep yang telah dipahami oleh masyarakat, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai sebuah penyimpangan. Namun konsep yang ada di masyarakat selama ini menjadi sumber permasalahan diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Walaupun konstruksi sosial yang ada berdampak bagi keduanya, namun pihak perempuanlah yang paling dirugikan (Mulia dan Anik, 2005:3-4).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari fenomena-fenomena sosial. Masalah fenomena sosial tersebut seperti permasalahan politik, hukum, sosial budaya, ekonomi, gender dan sebagainya. Fenomena sosial yang terkait dengan masalah gender sangatlah kompleks. Pandangan masyarakat yang menganggap perempuan sebagai *the second sex* dalam kehidupan, sehingga menjadikan perempuan sering tidak diperhitungkan dalam bidang apapun di masyarakat. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama perempuan (Fakih, 2013:12).

Masyarakat hidup dengan pandangan yang memposisikan perempuan pada tingkat bawah dalam berbagai bidang, sehingga pandangan ini mempunyai dampak ketidakadilan terhadap perempuan. Kaum perempuan lebih sering menjadi objek dalam permasalahan gender, hal ini bisa dipahami karena mereka hidup dalam budaya patriarkhi. Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki mendominasi semua lingkup kemasyarakatan dan memegang kekuasaan sehingga perempuan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan, dan hal ini menguntungkan laki-laki (Mosse, 2007:64). Jadi, konstruksi gender patriarkhi adalah tentang pandangan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua bidang di masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan dari patriarkhi adalah pemberian stereotipe (label) terhadap perempuan. Seperti stereotipe yang diberikan masyarakat Jawa terhadap perempuan *macak*, *manak*, *masak*. Ketiga makna kata tersebut dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu berdandan, melahirkan, dan

memasak. Kegiatan tersebut distereotipekan (dilabelkan) kepada perempuan, karena kegiatan itu sesuai dengan peran dan tanggung jawab seorang perempuan.

Dalam dunia politik perempuan mengalami ketertinggalan jauh dengan laki-laki dalam partisipasinya. Proporsi perempuan di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki dalam kursi parlemen. Data dari KPU menyebutkan pada pemilu sebelumnya memang keterwakilan perempuan meningkat, diawali dari pemilu pada tahun 2004 sekitar 11,24 persen perempuan menguasai kursi DPR. Pada tahun 2009 perempuan menguasai sekitar 18,21 persen kursi parlemen sedangkan pada tahun 2014 keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat menurun yaitu 17 persen. Walaupun pemerintah sudah berupaya untuk dapat mendorong keterwakilan perempuan, namun upaya tersebut belum terlaksana sepenuhnya.

Secara umum beberapa partai politik memang sudah memenuhi proporsi 30 persen tersebut agar tidak terjadi ketimpangan gender dalam kursi parlemen. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota perempuan diharapkan dapat menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi satu prioritas kebijakan. Perempuan menjadi salah satu manufaktur penting dalam pembangunan dari isu-isu tersebut, sayangnya pandangan atau stereotipe yang sudah menjadi budaya di masyarakat menyebabkan perempuan harus merelakan kesempatan mereka untuk dapat duduk di parlemen karena tingkat dukungan yang rendah dari masyarakat tentang perempuan.

Untuk menjadi seorang pemimpin di dunia politik perempuan mengalami kesulitan. Bukan karena citra bahwa politik bukan dunia perempuan, tapi pemimpin tidak cocok bagi perempuan disebabkan oleh stereotipe atau label dari masyarakat tentang peran perempuan dan aktivitasnya. Selain stereotipe, ada faktor lain yang menghambat perempuan untuk dapat maju dan berkiprah di dunia politik. Hambatan yang diterima oleh perempuan untuk berkiprah di politik adalah pandangan agama Islam yang sangat kental dengan patriarkhi.

Dalam Islam, pandangan patriarkhi sangatlah kental, hal tersebut dilandasi beberapa kandungan dari Al-Qur'an maupun Hadits. Penelitian dari Inayah Raohmaniyah (2009) yang berjudul *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama* menjelaskan berbagai masalah yang sering mendapatkan kritik dari kalangan feminin atau diperdebatkan dalam kalangan umat Islam sendiri terkait dengan status dan peran perempuan dalam Islam, antara lain: 1) Konsep

Penciptaan Perempuan; 2) Status Ontologis dan Otonomi Perempuan; 3) ketaatan Istri pada Suami; 4) Poligami; 5) Konsep Wali; 6) Konsep Mahram; 7) Kepemimpinan Perempuan dalam wilayah domestik, publik (termasuk politik) maupun dalam Ibadah (termasuk Imam Salat); 8) Saksi perempuan; 9) Warisan; 10) Perempuan Bekerja; 11) Perceraian; dan 12) Akikah.

Terdapat satu pandangan dari pihak yang menyebutkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan anggota parlemen adalah sama hukumnya untuk memilih perempuan menjadi anggota parlemen atau pemimpin (terlibat dalam dunia politik) yang kedua-duanya dilarang. Pandangan tersebut berlandaskan pada: 1) al-Quran Surah al-Ahzab {33}: [33], An-Nisa' {4}: [34], al-Baqarah {2}: [228]; 2) Hadits Nabi Saw tentang suatu kaum yang tidak boleh menyerahkan urusan kepemimpinan terhadap perempuan; 3) Ijma; 4) Qiyas (Ja'far, 1998:41-44).

Namun, pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018. Ada beberapa perempuan yang dapat memenangkan kursi tertinggi pemerintahan di wilayah tersebut dan dapat mengalahkan calon kepala daerah lainnya. Salah satunya adalah kabupaten Jombang. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, Jombang melaksanakan pemilihan kepala daerah atau bupati. Terdapat tiga calon bupati yang mengisi kursi kontestasi pilkada Jombang 2018 namun dari ketiga calon tersebut perempuan dapat mengalahkan kedua calon bupati laki-laki tersebut yang juga mempunyai rekam jejak cukup banyak dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Jombang mempunyai julukan sebagai kota santri, yang mempunyai makna bahwa di kabupaten Jombang memiliki pondok pesantren yang cukup banyak. Wilayah kabupaten Jombang dikelilingi oleh beberapa pondok pesantren terkenal dan besar. Dari selatan terdapat pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, dari timur pondok pesantren Darul Ulum perterongan, dari barat pondok pesantren Denanyar, serta dari wilayah utara pondok pesantren Tebuireng. Selain terkenal dengan pusat pendidikan Islam modern di Indonesia, Jombang juga dikenal sebagai kota lahirnya Nahdlatul Ulama, karena penggagas serta pendiri organisasi tersebut merupakan kyai besar dan ulama di Jombang yaitu KH. Wahab Hasbullah dan KH. Hasyim Asy'ari.

Pemimpin perempuan mengalami polemik, bukan karena faktor kepemimpinan tapi interpretasi agama yang tabuh saat perempuan menjadi pemimpin. Namun sebagai kota yang mempunyai julukan sebagai kota santri yang bermakna bahwa tempat tersebut mempunyai pondok pesantren yang cukup banyak, serta

mayoritas penduduk beragama Islam, justru perempuan dapat memenangkan kontestasi pemilihan pemimpin di Jombang.

Tabel 01 Perolehan Suara Keseluruhan dalam Pilkada Jombang 2018

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Total Suara
01.	Hj. Mundjidah Wahab dan Sumrambah	48.30%
02.	Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko dan Drs. M. Subhaidi, M.Si.	34.34%
03.	Dr. Syafiin, SH, MM, MH. dan Choirul Anam, ST.	17.36%

Sumber: KPU Tahun 2018

Hj. Mundjidah Wahab merupakan bupati perempuan pertama di kabupaten Jombang. Bupati merupakan jabatan politik tertinggi di kabupaten. Selain itu, proses pemilihan bupati menggunakan sistem demokrasi yang berarti menggunakan suara rakyat atau pemilihan langsung dari rakyat. Perempuan dapat menduduki kursi bupati di Jombang merupakan suatu hal fenomena langkah atau belum pernah terjadi. Dari beberapa kali pilkada di Jombang, tahun 2018 calon bupati perempuan dapat mengalahkan calon bupati laki-laki yang lain.

Pemahaman yang didapatkan individu akan menimbulkan pandangan atau paradigma dalam kehidupannya di sosial. Salah satunya adalah pandangan gender patriarkhi. Di pondok pesantren konstruksi gender patriarkhi sangatlah kental. Hal tersebut didapatkan dari proses pembelajaran para kyai, nyai, dan guru dengan menggunakan dalil-dalil. Sosialisasi penguatan normativitas gender terjadi pada semua lini kehidupan pesantren, baik terhadap santri, termasuk terhadap masyarakat sekitar pesantren dan masyarakat luas (Marhumah, 2010:129). Namun, dalam pemilihan bupati Jombang tahun 2018 wilayah sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, perempuanlah yang berhasil menguasai suara sebagian besar.

Tabel 02 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil dalam Pilkada Jombang 2018 di Tambak Beras

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil	Total Suara
01.	Hj. Mundjidah Wahab dan Sumrambah	1.858
02.	Drs. Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko dan Drs. M. Subaidi, M.Si.	1.023
03.	Dr. Syafiin, SH, MM, MH. Dan H. Choirul Anam, ST.	639
Total Suara		3.520

Sumber: KPU tahun 2018

Kemenangan Hj. Mundjidah Wahab merupakan bentuk dari suatu kejadian yang kontradiktif, karena wilayah dengan dominasi ajaran agama Islam yang kuat dengan unsur budaya patriarki namun kenyataannya perempuan dipilih sebagai bupati atau pemimpin tertinggi di kabupaten. Tambak Beras merupakan wilayah yang berada di sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum, yang merupakan pondok pesantren terbesar di kabupaten Jombang dengan memiliki santri terbanyak daripada pondok pesantren lainnya yang berada di kabupaten Jombang.

Pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras merupakan pesantren paling tertua di Jombang dan merupakan asal muasal berdirinya pondok pesantren di Jombang (<http://nahdlatululama.id/blog/2017/04/24/pesantren-bahrul-ulum-tambak-beras/>). Berdasarkan penelitian dari Atiqatul Maula (2016) yang berjudul Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang. Pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras juga merupakan pesantren kental dengan budaya dominasi laki-laki, karena pembagian pengasuh di pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras mengutamakan garis keturunan laki-laki.

Fenomena kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati perempuan yang dapat merebut kursi tertinggi dalam pemerintahan Jombang, merupakan kajian yang menarik apabila dianalisis. Bukan hanya karena Mundjidah tokoh perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Melainkan kemenangan yang didapatkan di wilayah agamis. Jombang merupakan wilayah agamis, hal tersebut didapatkan melalui julukan sebagai kota santri yang memiliki makna bahwa wilayah tersebut mempunyai banyak pondok pesantren.

Penelitian ini didasari oleh teori konstruksi sosial Peter L Berger. Berger (1990) mengungkapkan bahwa konstruksi sosial akan muncul karena adanya tiga moment dialektika eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia). Obyektivasi (interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi). Internalisasi (individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggota). Dengan menggunakan moment dialektika tersebut, maka peneliti dapat melihat konstruksi masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras tentang pemimpin perempuan serta kemenangan Hj. Mundjidah sebagai bupati.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. Penelitian yang diangkat bertujuan untuk mendeskripsikan suatu realitas atau fenomena tentang kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati perempuan pertama kali di Jombang, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dengan menggunakan desain penelitian fenomenologi mempunyai arti bahwa peneliti ingin menginterpretasikan konstruksi tentang kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati perempuan pertama di Jombang. Penelitian bertempat di Tambak Beras Jombang yang merupakan wilayah sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum.

Fokus dari penelitian adalah mencari konstruksi yang berupa pandangan individu tentang pemimpin perempuan dan kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati Jombang. Menurut Mar'at dalam (Rifa'I, 2009:22-23) bahwa pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah dokumen dari berita *online* yang memaparkan dukungan anggota badan otonom Nahdlatul Ulama terhadap Hj. Mundjidah Wahab dan Sumrambah menjadi bupati, dokumentasi data tentang profil Hj. Mundjidah Wahab serta arsip tentang gambaran desa.

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini melihat deskripsi konstruksi masyarakat wilayah pondok pesantren Tambak Beras tentang kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai Bupati dalam pilkada Jombang tahun 2018. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan dokumentasi dari berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras mengonstruksi patriarkhi untuk pemimpin. Konstruksi masyarakat tentang pemimpin perempuan adalah pemimpin perempuan tidak sesuai dengan ajaran agama (Surat An-Nisa' ayat 34). Pemimpin perempuan menyalahi "kodrat" (kodrat yang selalu menempatkan perempuan pada ranah domestik. Serta pemimpin perempuan tidak tegas dan lemah.

Pemimpin perempuan tidak sesuai dengan ajaran agama (Surat An-Nisa' ayat 34)

Terdapat dua pihak yang memperbolehkan dan menentang perempuan ketika menjadi pemimpin. Pihak yang memperbolehkan merupakan kelompok yang memiliki interpretasi terhadap ajaran agama Islam yang bersifat egalitarian atau *Musawaah* (persamaan). Kelompok yang kedua adalah menolak perempuan untuk menjadi pemimpin difaktorkan oleh interpretasinya terhadap kandungan surat dalam Al-Qur'an.

Masyarakat sering mengartikan atau mengaitkan dengan surat An-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki mempunyai kekuasaan lebih besar daripada perempuan, sehingga menjadikan masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki lebih baik untuk menjadi raja atau pemimpin yang berkuasa daripada perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh FZ (54 Tahun),

"Kalau menurut saya sendiri pemimpin adalah laki-laki, karena pemimpin merupakan tugas seorang laki-laki, selain itu juga dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian dari perempuan. Dengan surat tersebut maka intinya selagi ada laki-laki kenapa memilih perempuan dalam pemimpin" (Wawancara, 24 Januari 2019).

FZ (54 Tahun) menjelaskan bahwa pemimpin adalah tugas dari seorang laki-laki. Pemaknaan yang diambil dari kandungan surat An-Nisa' ayat 34 menurutnya adalah bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga ketika masih ada laki-laki untuk menjadi pemimpin kenapa harus memilih perempuan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Kh (60 Tahun),

"Kalau prinsip saya memilih pemimpin harus memilih laki-laki. Selagi ada laki-laki kenapa pilih perempuan. Karena menurut saya laki-laki yang sangat pantas memimpin daripada perempuan" (Wawancara, 20 Januari 2019).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kh (60 Tahun) dapat dilihat bahwa prinsip memilih pemimpin adalah seorang laki-laki. Terlepas dari latar belakang yang dimiliki, menurutnya laki-laki lah yang

sangat pantas dan cocok untuk menjadi pemimpin. Prinsip tersebut muncul dari faktor interpretasi dalam kandungan surat yang dijelaskan soleh UA (21 Tahun), "Soalnya dalam agama kan juga menganjurkan untuk kita memilih laki-laki kan mas? Untuk menjadi pemimpin" (Wawancara, 20 Januari 2019).

Pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan sudah menyebar di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa pemimpin seharusnya adalah laki-laki. Dalam agama pun mereka meyakini bahwa kepemimpinan laki-laki lebih diharapkan dibandingkan perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh LM (59 Tahun), "*soalnya wong wedok iku kodrate ngurus umah lan sembarang kalire tapi nek pemimpin iku kudu wong lanang kan onok ya nang an-nisa itu mas*" (Wawancara, 20 Januari 2019).

LM (59 Tahun) berpendapat dalam surat An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa pemimpin harusnya adalah laki-laki, maka dengan interpretasi yang diambil dari surat tersebut beranggapan bahwa kodratnya seorang perempuan adalah di rumah. Pemaknaan atau interpretasi yang didapatkan dari surat An-Nisa' ayat 34 menjadikan masyarakat memberikan pernyataan kehidupan bahwa perempuan untuk menjadi pemimpin adalah suatu hal yang bersifat tabu atau tidak biasa. Seperti yang diungkapkan oleh SK (45 Tahun),

"*Nek menurutku mas, wong wedok dadi pemimpin iku kurang srek soale lapo to mas, soale wong wedok iku kadang gampang kasihan (baper). Kan ya kodratnya perempuan itu di bawah laki-laki juga to mas. Dan kalau perempuan memimpin niku ga bisa semantap laki-laki*"

("Kalau menurut saya mas, seorang perempuan menjadi pemimpin itu kurang tepat karena seorang perempuan itu biasanya selalu terbawa perasaan. Dan juga kodratnya perempuan itu di bawah laki-laki juga mas. Dan kalau perempuan memimpin itu tidak bisa semantap laki-laki"). (Wawancara, 19 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SK (45 Tahun) dapat dijelaskan bahwa masyarakat menganggap perempuan menjadi pemimpin adalah suatu hal yang kurang baik. Alasan tersebut melihat bahwa dalam sosiokultural pemimpin adalah laki-laki, sehingga ketika perempuan menjadi pemimpin tidak sebagus laki-laki ketika menjadi pemimpin. Seperti yang diungkapkan oleh UA (21 Tahun),

"Soalnya masyarakat melihat bahwa pemimpin itu lebih baiknya adalah laki-laki. Kalau ada laki-laki kenapa perempuan dipilih. Karena laki-laki secara kodratnya itu menjadi pemimpin, kepala keluarga, kepala rumah tangga. Begitupun dengan organisasi atau yang lain lebih pantas dipimpin laki-laki" (Wawancara, 19 Januari 2019).

Jawaban dari UA (21 Tahun) dapat mengartikan bahwa di masyarakat laki-laki memang dijadikan sebagai pemimpin karena keutamaannya daripada perempuan. Interpretasi masyarakat dari surat An-Nisa' ayat 34 menjadikan mereka memiliki pandangan terhadap pemimpin perempuan. Stereotipe tersebut adalah ketidakpercayaan kepada pemimpin perempuan.

Perempuan menjadi pemimpin mendapatkan citra negatif dari masyarakat. Bukan karena politik atau tugas pemimpin tidak cocok untuk perempuan, melainkan stereotype tentang tugas dan peran seorang perempuan dalam masyarakat. Pandangan negatif dan stereotype dari masyarakat tersebut didapatkan melalui interpretasi terhadap agama.

Masyarakat mengartikan isi kandungan atau makna dalam surat An-Nisa' ayat 34 bahwa kedudukan laki-laki selalu diutamakan. Salah satunya adalah dalam hal memimpin, masyarakat lebih menilai positif atau baik terhadap kepemimpinan laki-laki daripada perempuan. Masyarakat menilai bahwa pemimpin adalah laki-laki, karena pandangan tersebut berasal dari interpretasi surat An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan perempuan, sehingga arti kekuasaan tersebut diartikan raja atau pemimpin dalam masyarakat ataupun keluarga.

Perempuan menjadi pemimpin menyalahi “kodrat” (kodrat perempuan yang selalu ditempatkan di wilayah domestik)

Jika dilihat pada permasalahan sulitnya perempuan dalam menggapai kekuasaan atau kepemimpinan adalah karena faktor stereotype tentang peran perempuan, pandangan perempuan tradisional serta pandangan agama tentang yang seharusnya menjadi pemimpin. Stereotipe tentang peran perempuan yang lebih baik menghabiskan waktunya di rumah, mengurus rumah serta menjadi ibu serta istri yang baik bagi anak dan suaminya. Stereotipe dari pandangan perempuan yang bersifat tradisional, yang mengharuskan mereka tidak pantas dan tidak cocok untuk menjadi pemimpin dalam konstruksi masyarakat.

Perempuan dalam masyarakat mempunyai “kodrat” sebagai sosok yang berperan sebagai ibu yang baik dan istri yang baik. Sebagai ibu yang baik perempuan harus mendidik dan merawat anaknya sampai dewasa. Sedangkan menjadi istri yang baik adalah perempuan selalu menjadi teman dan pendukung setia suami serta merawat dan melayani suami dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh FZ (54 Tahun) sebagai berikut, “Kalau istilah jawanya seorang perempuan itu sebagai *konco wingking*” (Wawancara, 24 Januari 2019).

Menurut FZ (54 Tahun) seorang perempuan adalah

sebagai *konco wingking* yang memiliki arti bahwa perempuan merupakan teman belakang dari suami. Perempuan dalam anggapannya memiliki kewajiban untuk mendukung suami, baik dalam hal pekerjaan ataupun sebaliknya. Dari interpretasi yang disampaikan terdapat istilah jenis kelamin yang dikodratkan dari masyarakat atau yang disebut Jenis kelamin sosial.

Disebut jenis kelamin sosial karena hal itu merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi norma sosial bahwa masyarakat membedakan peran dengan menghubungkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Walaupun peran tersebut tidak mempunyai kaitan dengan kondisi tampilan dan fungsi fisik, namun secara kodrati memang mempunyai perbedaan biologis yang tidak dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh PS (35 Tahun) tentang kodrat dari seorang perempuan.

“Kodrat perempuan adalah *macak, manak* dan *masak* secara lahiriah wanita dari tempo dulu adalah satu bagian memasak, kedua melahirkan dan mengandung dan berhias, namun kebiasaan di era modern ini kebiasaan tersebut luntur, karena adanya emansipasi perempuan. Sedangkan tugas perempuan merupakan madrasah dari anak-anak seperti mengasih pembelajaran, dan pendidikan” (Wawancara, 15 Januari 2019).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, menurut PS (35 Tahun) bahwa kodrat seorang perempuan adalah melahirkan, berdandan dan memasak. Sedangkan tugas dari seorang perempuan adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya atau yang disebut dengan madrasah bagi anak. Namun, PS (35 Tahun) memaparkan bahwasanya kodrat tersebut sudah luntur sebagian karena adanya emansipasi terhadap perempuan salah satunya memasak yang bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Menurutnya emansipasi merupakan hal yang tak sepatutnya untuk dilaksanakan karena perempuan memang ditakdirkan dengan kodrat dan tugas tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh LM (59 Tahun) bahwa perempuan lebih baik menjadi sebagai ibu dan istri di rumah. Berikut pendapatnya.

“Tidak mas. Karena pada dasarnya mereka adalah kaum-kaum yang mempunyai kodrat di rumah. Lah sekarang loh mas koyok aku, kan bagusnyanya merawat cucu di rumah” (Wawancara, 20 Januari 2019).

Menurut LM (59 Tahun) menjelaskan bahwa kodrat perempuan lebih baik di rumah seperti merawat anak dan cucu. LM (59 Tahun) berpendapat bahwa sesungguhnya perempuan mempunyai toleran terhadap laki-laki. Toleransi itu muncul bahwa perempuan memang harus melakukan tugas yang ada di rumah karena suami sudah bekerja untuk keluarga, maka

kegiatan rumah ditanggung oleh perempuan. Selain itu juga LM (59 Tahun) mempunyai pendapat sama dengan PS (35 Tahun) bahwa perempuan memiliki kodrat memasak, berdandan dan melahirkan.

Masyarakat yang lain pun juga memiliki pandangan yang sama tentang tugas dan kodrat dari seorang perempuan. Pandangan tersebut menempatkan perempuan pada lingkup domestik. Menurut MH (44 tahun), *“Nek menurutku mas tugase wong wedok secara umum adalah mengurus rumah tangga, sedangkan kodrat perempuan adalah mempunyai anak dan melahirkan”* (Wawancara, 18 Januari 2019).

Berdasarkan petikan wawancara yang disampaikan oleh MH (44 Tahun), menjelaskan bahwa menurutnya tugas perempuan yang lebih dominan di lingkup domestik. Tugas tersebut seperti merawat rumah, melayani anak dan suami. MH (44 Tahun) menyatakan bahwa tugas tersebut wajib dilakukan oleh seorang perempuan. Pendapat selaras pun diungkapkan oleh Ms (63 Tahun),

“Tugasnya perempuan adalah membantu rumah tangga, selain itu tugasnya perempuan adalah macak, manak, masak yang sesuai dengan pandangan masyarakat Jawa tentang peran dan tugas perempuan. Sedangkan kodrat perempuan adalah melahirkan, menyusui dan mendidik anak” (Wawancara, 18 Januari 2019).

Pandangan yang selaras bukan hanya disampaikan oleh seseorang yang beristri atau berkeluarga. Namun, santri atau pelajar yang berasal dari pondok pesantren Bahrul Ulum juga mempunyai pandangan dan pendapat yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh RD (19 Tahun), *“Kodrat perempuan adalah melahirkan dan tugasnya perempuan memasak. Semua itu tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki”* (Wawancara, 19 Januari 2019).

Perempuan dalam masyarakat dipandang sebagai istri, yaitu mempunyai tugas untuk melayani suaminya sebaik mungkin, sehingga disebut sebagai istri solehah. Sedangkan kelak ketika perempuan menjadi ibu selain dengan kewajibannya menjadi istri untuk mengurus suaminya mereka juga dituntut untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya sebaik mungkin. Masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja di luar rumah karena itu merupakan tugas pokok suami. Seperti yang diungkapkan oleh PS (35 Tahun),

“Sebenarnya bukan kewajiban, namun tergantung dilihat dari suaminya apakah memperbolehkan atau mengizinkan atau tidak, karena sifatnya adalah membantu suami, karena tugas suami adalah kepala rumah tangga jadi yang bekerja untuk mencari uang, bukan prioritas perempuan untuk mencari uang. Sedangkan apabila

perempuan tidak melakukan izin terhadap suami untuk bekerja dipublik adalah suatu hal yang dilarang dan tidak baik, begitupula ketika perempuan dilarang untuk bekerja oleh suami tapi dia melanggarnya maka perempuan tersebut mendzolimi suaminya tanpa ridho suaminya” (Wawancara, 15 Januari 2019).

Menurut PS (35 Tahun) perempuan bekerja bukanlah suatu kewajiban, karena pekerjaan di luar rumah merupakan tugas dari seorang suami. Dan perempuan lebih baiknya adalah di rumah, apabila mereka akan melakukan suatu hal pekerjaan di luar rumah maka satu keharusan yang dikerjakan adalah izin terhadap suami terlebih dahulu. Begitu juga menurut MH (44 Tahun),

“Nek menurutku mas menurutku pribadi seharusnya seorang perempuan menurutku luwih apiknya di rumah mengurus rumah tangga, karena untuk bekerja itu tanggung jawab wong lanang atau suami”

“Kalau menurut saya mas, menurut saya pribadi seharusnya seorang perempuan itu lebih baik di rumah untuk mengurus rumah tangga, karena untuk bekerja itu merupakan tanggung jawab seorang laki-laki atau seorang suami”). (Wawancara, 18 Januari 2019).

Pendapat tersebut dipertegas lagi oleh MH (44 Tahun), bahwa alasannya berpendapat perempuan lebih baiknya di rumah karena untuk menjaga rumah dan untuk mendidik anak. Seperti yang diungkapkan oleh Kh (59 Tahun),

“Bukane gak ngolehi tapi lauweh apik e di rumah untuk membimbing anak, kalau perempuan kerja dan seorang laki-laki kerja di rumah anak tidak ada yang mendidik. Apalagi kalau suami tok seng nang omah yo anak e ga keramut. Anak e akhlak e yaopo sopo seng ngurus kan ga onok”

“Bukannya melarang, tapi lebih baiknya di rumah untuk membimbing anak, kalau perempuan kerja dan seorang laki-laki kerja di rumah jelasnya anak tidak ada yang mendidik. Apalagi kalau di rumah hanya seorang suami da istri kerja dapat disimpulkan anak tersebut tidak terurus dengan baik. Anak kalau di rumah tidak ada ibu bapak siapa yang akan mengurus akhlaknya kan tidak ada”. (Wawancara, 18 Januari 2019).

Pendapat dari Kh (59 Tahun) dan LM (60 Tahun) mempunyai kesamaan tentang perempuan yang bekerja di luar rumah. Dan dari pendapat mereka menyetujui bahwa setiap perempuan harus izin dulu terhadap suami ketika akan bekerja di luar rumah. Seperti pendapat yang disampaikan, *“Boleh, asal harus izin dan mendapat ridho dari sang suami terlebih dahulu, kalau tidak mengizinkan ya tidak boleh mas”* (Wawancara, 20 Januari 2019).

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan individu mempunyai tugas yang sangat besar yang didapatkan melalui perannya sebagai istri dan ibu. Menjadi seorang istri yang baik,

perempuan diharuskan melayani dan menemani suami sepanjang waktu. Sedangkan menjadi ibu, perempuan diharuskan untuk merawat dan menjaga anak-anaknya di rumah.

Pemimpin perempuan tidak tegas dan lemah

Pemimpin merupakan sosok yang mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat besar dengan masyarakat. Agar dapat memilih seseorang yang tepat, maka masyarakat sering mempunyai kriteria. Menggunakan kriteria adalah salah satu pilihan yang harus digunakan masyarakat untuk dapat menemukan pemimpin yang didambakan. Kriteria tersebut bisa dari kemampuan pengetahuan, sifat individu dan yang sering digunakan kriteria untuk memilih pemimpin adalah ketegasan. Seperti yang diungkapkan oleh MH (44 Tahun), "*Pemimpin iku wong sing tegas lan bijaksana*" (Wawancara, 18 Januari 2019).

MH (44 Tahun) berpendapat bahwa kriteria pemimpin adalah seseorang yang mempunyai sikap tegas dan bijaksana. Hal serupa juga diutarakan oleh LM (59 Tahun),

"Pemimpin itu seseorang yang tegas mas. Tegas itu mas, pemimpin harus bisa menjadi acuan putusan permasalahan. Jadi ketika ada yang salah ya bilang salah tanpa harus melihat keadaan. Contohnya kalau ada yang salah ya harus diperingatkan walaupun itu teman dekatnya atau sebagainya. Terus juga tegas dalam mengambil keputusan tidak lama-lama memutuskannya?"

Menurut LM (59 Tahun) pemimpin harus memiliki sifat tegas yaitu dapat mengatur dan mengarahkan bawahannya. Pemimpin menurut artiannya tegas adalah dapat berbuat adil, yaitu dapat menegur yang berbuat salah dan berani mengatakan bahwa itu benar atau salah. Sedangkan menurut Kh (60 Tahun),

"*Pemimpin iku kudu ndue sifat tegas yo mas, soale nek ga tegas yo ga iso ngurusi wong akeh. Tegas e iku mas maksute isok mbedakan urusan penting karo ga penting, selain iku pemimpin iku juga iso meninggalkan kepentingan awak e dewe dan ngabdikan untuk kepentingan wong akeh. Terus ga mencla mencla mas, nek bilang iyo iyo, ga yo ga*"

("Pemimpin itu harus mempunyai sifat tegas mas, kalau tidak bisa menjadi tegas ya tidak bisa mengurus orang banyak. Tegas yang dimaksud adalah bisa membedakan kepentingan yang bersifat penting dan tidak penting, selain itu pemimpin itu juga bisa meninggalkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabdikan untuk kepentingan orang banyak. Dan setelah itu harus bisa konsisten, kalau iya maka harus iya, jika tidak ya bilang tidak"). (Wawancara, 20 Januari 2019).

Kh (60 Tahun) mengungkapkan bahwa sifat tegas merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh

seorang pemimpin, karena mempunyai tujuan untuk mengatur bawahannya. Sifat tegas merupakan salah satu kepentingan sendiri buat seseorang untuk menjadi pemimpin.

Masyarakat sering memberikan stereotipe bahwa sikap tegas merupakan bagian sikap yang dimiliki oleh laki-laki. Pemimpin diposisikan hanya untuk seorang laki-laki, karena mereka mempunyai sikap tegas yang sesuai dari kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan stereotipe tersebut, maka laki-laki yang disetujui oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Seperti yang diungkapkan oleh RD (19 Tahun), "Kekurangannya tidak setegas laki-laki, dan mereka merupakan salah satu orang yang lebih cocok di rumah" (Wawancara, 19 Januari 2019).

Menurut RD (19 Tahun) perempuan ketika menjadi pemimpin tidak setegas laki-laki. Sikap tegas yang dimaksud adalah untuk pengambilan keputusan dan bertindak. Hal yang sama juga diutarakan oleh LM (59 Tahun),

"Perempuan kalau menjadi pemimpin itu kurang tegas tidak seperti laki-laki, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok jadi kalau dilurusin ya patah. Sebab itu perempuan tidak bisa mengalahkan laki-laki. *Sak teges tegese wong wedok ga ngarah isok ngalahno tegese wong lanang* (setegas apapun seorang perempuan, ia tidak bisa mengalahkan tegasnya seorang laki-laki)" (Wawancara, 20 Januari 2019).

Pendapat yang disampaikan oleh LM (59 Tahun) menjelaskan bahwa perempuan merupakan salah satu bagian kecil dari laki-laki. Menurutnya, perempuan menjadi pemimpin itu adalah melanggar kodrat. Proses penciptaan perempuan dari sudut pandang agama menjadikan perempuan tidak sempurna laki-laki. Hal ini berdampak pada kehadiran perempuan ketika berperan sebagai pemimpin. Kh (60 Tahun) mengungkapkan,

"Perempuan kalau menjadi pemimpin itu kurang tegas tidak seperti laki-laki, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok jadi kalau dilurusin ya patah. Sebab itu perempuan tidak bisa mengalahkan laki-laki" (Wawancara, 20 Januari 2019).

Kh (60 Tahun) berpendapat bahwa perempuan menjadi pemimpin itu kurang tegas tidak seperti laki-laki. Menurutnya, pemimpin dan sikap yang tegas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Kh (60 Tahun) ketegasan merupakan faktor paling penting untuk dapat menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin.

Selain alasan sikap tidak tegas, perempuan dikatakan tidak layak menjadi pemimpin karena perempuan adalah individu yang lemah, halus, dan cengeng. Perempuan

dikonstruksi oleh masyarakat sebagai makhluk yang emosional, sehingga tidak dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kodratnya atau tempatnya. Hal itu disampaikan oleh PS (35 Tahun),

“Perempuan salah satu makhluk yang selalu emosional. Jadi kelemahannya perempuan itu kadang tidak bisa menempatkan perasaan emosionalnya di tempat yang sesuai. Kalau kelebihanannya mungkin bisa menjadi seorang ayah juga kalau ayah tidak ada, tapi apapun laki-laki lah yang selalu diharapkan dan perempuan tidak bisa menjadi laki-laki saat menjadi pemimpin” (Wawancara, 15 Januari 2019).

Menurut PS (35 Tahun) perempuan merupakan salah satu makhluk yang selalu terbawa suasana. Perasaan yang selalu berubah-ubah tanpa sebab menjadikan perempuan mempunyai kelemahan yang sulit dipahami, sehingga dengan kelemahan tersebut mereka tidak pantas menjadi pemimpin. Meskipun perempuan dapat menjalankan peran laki-laki, PS (35 Tahun) mengungkapkan bahwa sosok kepemimpinan laki-laki tak pernah bisa tergantikan oleh perempuan.

MH (44 Tahun) berpendapat bahwa, “Perempuan selalu terbawa suasana, selain itu juga suasana hati yang terlalu berlebihan”. Selain itu, menurutnya kelebihan perempuan ketika menjadi pemimpin adalah sulit untuk diajak ke hal yang buruk. Namun, kelebihan itupun juga dimiliki oleh seorang pemimpin laki-laki. Hal ini terbukti dari sedikitnya perempuan yang terjerat kasus korupsi. Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh MH (44 Tahun), SK (45 Tahun) juga berpendapat hal yang sama,

“Nek menurutku mas, wong wedok dadi pemimpin iku kurang sreng soale lapo to mas, soale wong wedok iku kadang gampang kasihan (baper). Kan ya kodratnya perempuan itu di bawah laki-laki juga to mas. Dan kalau perempuan memimpin niku ga bisa semantap laki-laki”

(“Kalau menurut saya mas, seorang perempuan menjadi pemimpin itu kurang tepat karena seorang perempuan itu biasanya selalu terbawa perasaan. Dan juga kodratnya perempuan itu di bawah laki-laki juga mas. Dan kalau perempuan memimpin itu tidak bisa semantap laki-laki”). (Wawancara, 19 Januari 2019).

SK (45 Tahun) bahwa perempuan menjadi pemimpin merupakan suatu hal yang kurang tepat atau kurang baik. Menurutnya, perempuan merupakan makhluk yang mempunyai kekurangan dalam emosional dan ketegasan, sehingga membuat mereka tidak dapat menempatkan sesuatu sesuai pada kadarnya atau tempat. Perempuan dalam artian di masyarakat adalah individu yang nantinya akan menjadi ibu, sehingga sifat perempuan harus mencerminkan dirinya seperti ibu. Dengan kewajiban tersebut, maka sering perempuan

dipaksakan untuk feminin. Sikap feminin tersebut menimbulkan pandangan dari masyarakat bahwa perempuan lemah lembut dan tidak setegas dari laki-laki.

Konstruksi masyarakat sekitar pondok pesantren tentang kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati dalam pilkada Jombang 2018.

Masyarakat mengonstruksi patriarkhi untuk pemimpin. Akan tetapi, terdapat peristiwa paradox dalam kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati Jombang. Masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras mengonstruksi bahwa kemenangan Hj. Mundjidah tidak melanggar dari ajaran agama (surat An-Nisa’ ayat 34). Latar belakang Hj. Mundjidah Wahab sebagai orang baik dan anak dari seorang kyai serta suara perempuan Muslimat menjadikan beliau dapat memenangkan kursi tertinggi di Jombang.

Interpretasi agama (surat An-Nisa’ ayat 34) yang tidak berlaku bagi Hj. Mundjidah Wahab

Perempuan dihadapkan stereotipe dan batasan ketika menjadi pemimpin. Stereotipe tersebut membuat perempuan tidak dapat dipercaya untuk mengemban amanah dan tugas yang diberikan sebagai pemimpin. Faktor agama yang mendasari perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik atau menjadi pemimpin. Akan tetapi, pada pilkada Jombang 2018 Hj. Mundjidah dapat memenangkan kontestasi dan terpilih menjadi pemimpin pada wilayah kabupaten Jombang yaitu bupati.

Pada pemilihan bupati Jombang Tahun 2018 SK (45 Tahun) memilih Hj. Mundjidah Wahab. Padahal sebelumnya SK (45 Tahun) beranggapan bahwa perempuan menjadi pemimpin kurang tepat.

“Perempuan menjadi pemimpin di Jombang tidak apa-apa tapi kalau gubernur sama presiden tidak boleh. Karena bupati tingkat pemimpin yang masih rendah. Seumpama bu mundjidah tidak mencalonkan kemarin ya saya milih yang laki-laki mas, berhubung ada bu mundjidah yang merupakan orang baik menurut saya, ya saya memilih beliau. Contoh kemarin saya gubernur ya tidak memilih bu khofifah soalnya ada laki-laki juga”(Wawancara, 19 Januari 2019).

Menurutnya, bupati dipegang oleh seorang perempuan tidak menimbulkan permasalahan. Hal tersebut diperoleh melalui surat An-Nisa’ ayat 34. Menurutnya, menjadi kepala daerah kabupaten masih rendah dan perempuan diperbolehkan untuk menduduki kursi tersebut. Tapi untuk gubernur dan presiden perempuan tidak boleh, karena itu jabatan yang tinggi dan perempuan tidak akan bisa.

Mundjidah Wahab yang merupakan orang baik

Beberapa informan yang memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati karena adanya alasan ingin membalas budi kebaikan yang dilakukan oleh bu Mundjidah terhadapnya. Seperti yang diungkapkan oleh SK (45 Tahun), “*Anak saya pernah mondok ndek situ mas, dadi yo nek ga milih beliau ya ga pantes. Soalnya orangnya juga apikan*”. (Wawancara, 19 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari SK (45 Tahun) dapat dikemukakan bahwa faktor memilih Mundjidah sebagai bupati adalah ingin membalas kebaikan beliau yang merupakan sosok orang yang baik. Kebaikan tersebut berasal bantuan yang diberikan Mundjidah kepadanya. RD (19 Tahun) juga mengungkapkan hal yang sama, “*Milih mas, lah wong mas saya mondok dibelieu dan beliau juga anaknya kiyai dan baik sama tetangga*” (Wawancara, 19 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan RD (19 Tahun) dapat dikemukakan bahwa faktor yang mendasari memilih Mundjidah Wahab karena beliau merupakan guru bagi dirinya serta merupakan tetangga yang baik. Proses *given and taken* merupakan budaya yang berjalan di masyarakat. Budaya tersebut berjalan dengan suatu keharusan. Individu harus membalas dengan yang memberi, sehingga mereka akan merasa *sungkan* apabila tidak melakukan proses tersebut.

Selain adanya sikap balas budi yang dilihatkan oleh beberapa informan yang memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati. Informan lain pun memberi dukungan atau memilih Mundjidah sebagai bupati karena dengan alasan keharusan yang harus dilakukan oleh seorang tetangga. Seperti yang diungkapkan oleh PS (35 Tahun),

“*Gimana ya mas, memang agak kurang etis ketika perempuan memimpin tapi, saya sebagai warga Tambak beras sendiri harus memilih tetangga saya sendiri untuk kemajuan desa saya*” (Wawancara, 15 Januari 2019).

Menurut PS (35 Tahun) memilih Mundjidah Wahab sebagai bupati adalah keharusan yang dilakukan olehnya karena beliau merupakan warga Tambak Beras, sehingga apabila menang sebagai bupati dapat mengangkat kesejahteraan warganya. Alasan lain memilihnya adalah faktor dari keluarga yang mempunyai derajat tinggi di sekitar wilayah pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.

UA (21 Tahun) juga mengungkapkan hal senada dengan PS (35 Tahun),

“*Aku iki tonggo omahe wong e kok isok e ga milih wonge. Cuma faktor lainnya orangnya itu baik, latar belakang keluarganya bagus dari keluarga pondok dan garis silsilah mbah wahab yang merupakan panutan NU jadi ya itu faktor hati kita untuk memilih beliau. Kalau tidak memilih beliau*

rasanya tidak orang Tambak Beras”

“*Saya ini tetangganya beliau ya harus memilih beliau kok bisanya tidak memilih beliau. Cuma faktor lainnya orangnya itu baik, latar belakang keluarganya bagus dari keluarga pondok dan garis silsilah mbah wahab yang merupakan panutan NU jadi ya itu faktor hati kita untuk memilih beliau. Kalau tidak memilih beliau rasanya tidak orang Tambak Beras*” (Wawancara, 19 Januari 2019).

PS (35 Tahun) dan UA (21 Tahun) mempunyai alasan bahwa memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati Jombang karena tindakan yang harus dilakukan olehnya. Sosok Mundjidah yang merupakan individu menurutnya baik, dari segi latar belakang keluarga maupun yang lain menjadikan tindakan tersebut harus dilaksanakan walaupun pemahaman yang dimiliki tidak membenarkannya.

Dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor alasan masyarakat memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati. Alasan pertama adalah kekerabatan yang dibangun dalam kehidupan sosial dan alasan yang terakhir adalah faktor latar belakang Mundjidah Wahab yang merupakan individu terpendang di Tambak Beras.

Hj. Mundjidah Wahab dipilih sebagai bupati karena adanya keterpaksaan dari individu sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Keterpaksaan tersebut dilandasi karena suatu keharusan yang akhirnya menolak dari pemahaman didapatkan atau yang diperoleh selama ini. Memilih Hj. Mundjidah sebagai bupati karena alasan membalas kebaikan selama ini yang dilakukan olehnya, sehingga harus membalas kebaikan tersebut dengan cara memilih sebagai bupati.

Anak kyai dan suara perempuan Nahdlatul Ulama

Dengan mempunyai latar belakang dari keluarga kyai serta aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama menjadikan beliau dikenal oleh banyak orang dan salah satunya meraup keuntungan untuk menjadi bupati pada periode 2018 sampai dengan 2023. Seperti pemaparan yang disampaikan oleh sedangkan menurut Ms (63 Tahun),

“*Hj. Mundjidah dapat memenangkan pilkada Jombang karena faktor muslimat yang sangat kuat. Dan dari faktor latar belakang keluarga pondok yang merupakan pendiri Bahrul Ulum juga mas*” (Wawancara, 18 Januari 2019)

Dari pendapat yang disampaikan oleh Ms (63 Tahun) menjelaskan bahwa faktor dari kemenangan Hj. Mundjidah Wahab dilandasi dari suara anggota muslimat yang mendominasi di Tambak Beras maupun di Jombang, selain itu faktor dari pondok pesantren Bahrul Ulum yang juga merupakan salah satu pijakan Hj. Mundjidah terkenal oleh banyak orang. Pernyataan lain diungkapkan oleh Ms (63 Tahun),

“Biasa mas, lah wong saya tidak memilih beliau kok ben dadi bupati. Soale lapo yo, yo maeng iku. Karena itu tadi perempuan menurut saya kurang cocok atau srek kalau jadi pemimpin, soalnya tidak sebagai laki-laki”

(“Biasa saja mas, soalnya saya tidak pernah memilih beliau kok. Karena itu tadi perempuan menurut saya kurang cocok kalau jadi pemimpin, soalnya tidak sebagai laki-laki”). (Wawancara, 18 Januari 2019)

Ms (63 Tahun) merupakan warga Tambak Beras yang merupakan tetangga dari Hj. Mundjidah Wahab sebelum pindah tempat ke rumah dinas bupati Jombang. Dari pendapatnya dapat tergambar bahwa walaupun beliau merupakan tetangga dan warga Tambak Beras tidak memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati, karena faktor dari prinsip paradigmanya bahwa perempuan tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Berbeda halnya yang diungkapkan oleh MH (44 Tahun),

“Faktor muslimat mas, muslimat itu pegangannya kuat sekali. Kalau atasannya bilang A wes kuabeh nganut. Wong muslimat iku uangel tekukane dan fanatiknya kepada bu mundjidah kuat. Mungkin faktor bu mundjidah menang juga gara-gara wakilnya yang laki-laki. Terus yo beliau anak e wong terpendang nang pondok anak e kyai lah gara gara itu beliau menang kan”

(“Faktor muslimat mas, muslimat itu pegangannya kuat sekali. Kalau atasannya bilang A semua mengikuti perintah tersebut. Soalnya muslimat itu sangat susah untuk dirayu dan fanatiknya mereka terhadap bu Mundjidah kuat. Mungkin bu Mundjidah menang juga dikarenakan wakilnya laki-laki. Serta juga beliau kan keturunan orang terpendang kan mas. Dari beberapa alasan tersebut beliau bisa menang”). (Wawancara, 18 Januari 2019).

Menurut MH (44 Tahun) kemenangan Hj. Mundjidah Wahab murni berasal dari Muslimat. Karena menurutnya di Muslimat semuanya mendukung Hj. Mundjidah Wahab untuk menjadi bupati Jombang yang merupakan salah satu pimpinan dalam Muslimat di Jombang. Namun berbeda halnya dengan yang diucapkan oleh LM (59 Tahun) yang merupakan anggota Muslimat di Tambak Beras,

“Hj. Mundjidah Wahab menang itu karena suara muslimat yang besar. Mbak mundjidah itu menang gara-gara ayahnya, ayahnya kan pahlawan nasional dan kyai tersohor dan terkenal jadi masyarakat terpengaruh gara-gara hal tersebut, andaikan mbak itu bukan anaknya mbah Wahab *Wallahu'allam*, ga mungkin bisa. Kan di sini (tambak beras) memilih beliau gara-gara mbah wahab” (Wawancara, 20 Januari 2019).

LM (59 Tahun) merupakan salah satu anggota Muslimat di Tambak Beras yang menggunakan

pilihannya untuk memilih pasangan bupati selain Hj. Mundjidah Wahab. LM (59 Tahun) menyatakan,

“Ada beberapa faktor yang melandasi, tapi saya tidak memilih mbak mund karena prinsip saya tadi mas. Perempuan itu tidak pantas menjadi pemimpin. Kalau ada laki-laki kenapa milih perempuan” (Wawancara, 20 Januari 2019).

Menurut LM (59 Tahun) kemenangan Hj. Mundjidah berasal dari faktor keluarga. Keturunan kyai tersohor di Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama menjadi kan nama Wahab sebagai acuan untuk masyarakat memilih beliau. Menurut LM (59 Tahun) juga memaparkan bahwa kalau tidak disokong oleh faktor keturunan dari ayahnya Hj. Mundjidah Wahab tidak terpilih sebagai bupati Jombang. Lain halnya dengan Kh (60 Tahun),

“Tidak semuanya itu memilih beliau mas. walaupun pondok juga ada yang pecah katanya tapi tidak tahu sekarang katanya ga, tapi ya manusia kita tidak mengerti hatinya. Tapi warga NU juga kan ada yang milih pak subaidi. Pak subaidi ya orang NU ya baik terhadap semua orang selalu segan” (Wawancara, 20 Januari 2019).

Menurut Kh (60 Tahun) bahwa tidak semua anggota Muslimat memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati walaupun beliau adalah ketua Muslimat. Anggota Muslimat juga memilih kader Nahdlatul Ulama lain yang terdapat pada pilihan saat pilkada Jombang Tahun 2018. Berbeda halnya dengan RD (19 Tahun) yang merupakan santri di Tambak Beras yang mengungkapkan, *“Milih mas, lah wong mas saya mondok dibelieu dan beliau juga anaknya kiyai dan baik sama tetangga”* (Wawancara, 19 Januari 2019).

RD (19 Tahun) merupakan salah satu santri yang pernah menimba ilmu di salah satu pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Dalam pernyataannya dapat disimpulkan bahwa alasan memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati karena hubungan kekeluargaan serta faktor anak kyai yang merupakan *role mode* dalam beragama, sehingga dengan alasan itu RD (19 Tahun) meninggalkan prinsipnya untuk memilih pemimpin.

“Gimana ya mas. Lah wonge punya pondok e mas nang kene, wong e apik an terus ya nek ga milih iku yaopo yoan ya. Wonge apik an soale. Ambi tonggo- tonggo kene i apik, yo ambek tonggo idek-idek iki apik”

(“Gimana ya mas. Orangnya punya pondok pesantren mas, orangnya juga baik. Kalau saya tidak memilih ya gimana. Soalnya sama tetangga dekat beliau baik”). (Wawancara, 22 Februari 2019).

Memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati adalah suatu tindakan yang haerus dilakukan oleh RD (19 Tahun). Mengingat karena Mundjidah merupakan

seseorang yang memiliki pondok yang pernah ditempati untuk menuntut ilmu. Pendapat serupa juga disampaikan oleh UA (21 Tahun) ,

“Aku iki tonggo omahe wong e kok isok e ga milih wonge. Cuma faktor yang lain orangnya itu baik, latar belakang keluarganya bagus dari keluarga pondok dan garis silsilah mbah wahab yang merupakan panutan NU jadi ya itu faktor hati kita untuk memilih beliau. Kalau tidak memilih beliau rasanya tidak orang Tambak Beras”

“(Saya ini tetangganya beliau ya harus memilih beliau kok bisanya tidak memilih beliau. Cuma faktor yang lain orangnya itu baik, latar belakang keluarganya bagus dari keluarga pondok dan garis silsilah mbah wahab yang merupakan panutan NU jadi ya itu faktor hati kita untuk memilih beliau. Kalau tidak memilih beliau rasanya tidak orang Tambak Beras”). (Wawancara, 19 Januari 2019).

Menurut UA (21 Tahun) menyatakan bahwa ia harus memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati karena keharusan yang dilakukan sebagai tetangganya. Selain itu faktor yang lain dari keturunan dari kyai serta Nahdlatul Ulama. Namun alasan memilih karena kewajiban sebagai tetangga merupakan suatu alasan yang berbentuk pengalihan, karena menurut UA (21 Tahun) memilih Hj. Mundjidah Wahab dilandaskan dengan kondisi latar belakang keluarga. Dari pernyataan UA (21 Tahun) dapat digambarkan bahwa seperti terdapat keterpaksaan untuk memilih Hj. Mundjidah Wahab.

Menurut informasi yang didapatkan oleh beberapa informan bahwa tidak ada paksaan dari lingkup pondok kepada masyarakat untuk memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati Jombang. Berikut pernyataan dari PS (35 Tahun),

“Tidak ada paksaan sama sekali dari sana mas untuk harus memilih Hj. Mundjidah Wahab. Soalnya juga pondok tidak sepahaman semua ketika pemilihan kemarin” (Wawancara, 15 Januari 2019).

Menurut PS (35 Tahun) mengungkapkan bahwa tidak ada paksaan dari pihak pondok untuk harus memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati Jombang. Hal serupa pun diutarakan oleh Fh (59 Tahun),

“Tidak ada paksaan mas. Lah pondok juga kemarin ada dua suara kok, yang satunya mengundang bupati lain yang tidak separtai dengan mbak mund” (Wawancara, 20 Januari 2019).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh PS (35 Tahun) dan Fh (59 Tahun) dapat diketahui bahwa dari pihak pondok pesantren tidak menggunakan strategi paksaan kepada warga sekitar untuk harus memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati. Bahkan pihak pondok sendiri ada yang berbeda pilihan. Namun

melihat beberapa pernyataan yang berpandangan bahwa kemenangan Hj. Mundjidah Wahab berasal dari faktor keturunan dan Muslimat, ada satu informan yang berpendapat berbeda dengan pandangan yang disampaikan sebelumnya. Berikut pendapat dari SK (45 Tahun).

“Bu mundjidah merupakan sosok yang baik, maka dari itu saya memilih bu mund. Dari beberapa calon yang korupsi dan saya tidak mengenal, maka saya memilih bu mundjidah yang merupakan sosok yang saya kenal dekat, beliau terhadap warga baik”(Wawancara, 19 Januari 2019).

Menurut SK (45 Tahun) Hj. Mundjidah Wahab merupakan sosok tetangga yang baik, yang perhatian dengan kondisi sekitar. Dengan alasan tersebut maka beliau memilihnya untuk menjadi bupati Jombang. Namun informasi yang didapatkan dari informan yang lain berbeda dengan yang disampaikan oleh SK (45 Tahun). Salah satu diantaranya adalah Ms (63 Tahun) yang berpendapat, *“ Halah mas, wonge apikan nek apene pemilihan tok lah di TPS ini lo beliau kalah”* (Wawancara, 18 Januari 2019). Menurutnya Mundjidah bukanlah tetangga yang baik, beliau baik pada situasi tertentu saja. Salah satunya pada moment pilkada.

Berdasarkan beberapa pernyataan dari informan dapat disimpulkan, bahwa faktor mereka memilih Hj. Mundjidah untuk menjadi bupati adalah selain tetangga dekat karena beliau merupakan seseorang yang berlatar belakang keluarga pondok pesantren serta mempunyai silsilah dari kyai besar di pondok Tambak Beras yaitu KH. Wahab Hasbullah. Beliau merupakan kyai dari pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras serta pendiri Nahdlatul Ulama.

Faktor pengalaman yang didapatkan dari kinerja selama menjadi wakil bupati tidak dilihat sebagai unsur dari kemenangan beliau dalam pilkada Jombang 2018. Seperti yang diungkapkan oleh RD (19 Tahun),

“Haduh piye ya, kan yang laki-laki kemarin ada yang korupsi toh mas, lah yang satunya lagi ga kenal jadi milih bu mundjidah. Tapi memang bu mundjidah merupakan orang baik dan beliau juga seorang yang berlatar belakang anak kyai mas” (“Gimana ya, kan yang calon dari laki-laki kemarin ada yang korupsi, jadi yang satunya lagi saya tidak kenal, jadi saya memilih bu mundjidah. Tapi memang bu mundjidah merupakan orang baik dan beliau juga seorang yang berlatar belakang anaknya dari seorang kyai”). (Wawancara, 19 Januari 2019).

Pemaparan yang disampaikan oleh RD (19 Tahun) dapat dipahami bahwa faktor untuk memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati adalah keturunan dari seorang kyai. Hal yang sama juga disampaikan oleh SK (45 Tahun),

“Bu mundjidah menang karena terdapat faktor dari muslimat dan pondok yang juga mempunyai ikatan sama beliau. Anak saya itu mondok di bu mundjidah, beliau itu keturunan kyai juga jadi itu alasan juga saya memilih beliau” (Wawancara, 19 Januari 2019).

Kemenangan Hj. Mundjidah Wahab dinilai oleh masyarakat berasal dari faktor keturunan kyai dan Muslimat yang merupakan badan otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama. Muslimat mempunyai peranan besar untuk Hj. Mundjidah Wahab dapat menang sebagai bupati, karena badan otonom tersebut memiliki anggota yang sangat banyak di Jombang. Selain itu faktor anak dari kyai.

Berdasarkan faktor dan alasan tersebut masyarakat berpandangan bahwa kemenangan Hj. Mundjidah sebagai bupati adalah keturunan dari anak kyai mbah Wahab (kyai tersohor dan pendiri Nahdlatul Ulama) serta pendukung Muslimat yang sangat kuat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa perempuan menjadi pemimpin adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama (surat An-Nisa' ayat 34). Dalam kehidupan sosial, perempuan memiliki “kodrat” (kodrat yang selalu menempatkannya pada posisi domestik). Selain itu, faktor kriteria pemimpin tegas yang tidak dimiliki perempuan. Perempuan menjadi pemimpin dianggap tidak tegas dan lemah. Konstruksi tentang pemimpin perempuan tersebut tidak berlaku pada kemenangan Hj. Mundjidah Wahab.

Masyarakat yang memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati mempunyai pandangan bahwa interpretasi dalam agama (surat An-Nisa' ayat 34) tidak berlaku bagi bupati yang merupakan jabatan rendah. Adanya ikatan kekerabatan sosial yang dijalin, menjadikan salah satu faktor fundamental masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras untuk memilih Mundjidah sebagai bupati. Faktor fundamental yang lain adalah adanya keturunan dari seorang kyai tersohor dan dihormati, sehingga masyarakat memilih Hj. Mundjidah sebagai bupati dalam pilkada Jombang 2018.

Pemahaman atau interpretasi dalam agama, menjadikan masyarakat menginternalisasi bahwa perempuan tidak layak dan tidak patut untuk menjadi pemimpin. Berbeda halnya dengan kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati. Masyarakat melakukan tindakan yang bersifat paradox. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan.

Menurut Berger ketika ada suatu hal yang bersifat paradoks atau kontradiktif yang dilihatkan oleh individu

atau subjektif menandakan tahap internalisasi yang tidak sempurna. Beberapa alasan atau faktor yang mendasari masyarakat melakukan tindakan kontradiktif atau paradoks dalam fenomena kemenangan Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati adalah kekerabatan sosial dan latar belakang yang dimiliki oleh Hj. Mundjidah Wahab. Dengan alasan tersebut menjadikan beberapa informan bertindak tidak sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini mendukung teori konstruksi dari Peter L. Berger yang menyebutkan bahwa konstruksi masyarakat terjadi dari ketiga moment dialektika yaitu eksternalisasi (Penyesuaian individu terhadap dunia sosiokultural), obyektivasi (Proses interaksi sosial dalam individu-individu yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi) dan internalisasi (individu mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Pada tahap eksternalisasi dijelaskan bahwa penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi. Dalam proses eksternalisasi Berger mencoba untuk memisah antara pengetahuan dan kenyataan. Masyarakat melihat bahwa kenyataan dalam kehidupan di kebudayaan sosial, perempuan digambarkan sebagai individu yang mempunyai peranan yang cukup besar. Peranan tersebut menjadikan perempuan terbelenggu dan tidak dapat meninggalkannya. Selain itu stereotipe yang berkembang dari masyarakat untuk perempuan yaitu jiwa keibuan yang menghasilkan sikap lemah dan tidak tegas.

Masyarakat mempunyai gambaran bahwa pemimpin merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan bertugas untuk dapat mensejahterakan bawahannya, sehingga semua kalangan dapat menjadi seorang pemimpin. Gambaran tersebut dijelaskan oleh Berger sebagai pengetahuan akal sehat (*common sense knowledge*).

Pada tahap obyektivasi, berdasarkan hasil penelitian masyarakat melihat bahwa perempuan merupakan individu yang bertempat pada bidang sub-ordinat. Proses interaksi sosial dalam individu-individu yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi disebut dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai moment dialektika obyektivasi. Pada moment dialektika tersebut dijelaskan proses menjadi manusia berlangsung dalam hubungan timbal-balik dengan suatu lingkungan, sehingga pada dasarnya manusia mengonstruksi kodratnya sendiri.

Dalam moment dialektika internalisasi Peter L. Berger menjelaskan bahwa individu

mengidentifikasi diri dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua subjek penelitian mempunyai pandangan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.

Masyarakat menilai bahwa perempuan tidak patut dan tidak layak untuk menjadi pemimpin didasarkan oleh pengaruh sosiokultural serta alasan interpretasi agama yang mereka dapatkan. Dalam tahap internalisasi Berger mengungkapkan ada dua tahap yang mempengaruhi individu dapat menafsirkan suatu peristiwa objektif. Tahap tersebut adalah sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak yang mempersiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi pada tahap sektor-sektor baru yaitu masyarakat.

Konstruksi yang dipaparkan oleh masyarakat dapat dikatakan sudah menjadi pola dalam kehidupan sosial. Karena dari semua informan konstruksi yang disampaikan mempunyai kesamaan yang hampir menyeluruh. Masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras mengonstruksi patriarkhi untuk pemimpin. Konstruksi tersebut didapatkan melalui ajaran agama yang selama ini didapatkan dari madrasah (sekolah) dan pengajian yang ada di masyarakat. Selain itu, nilai-nilai dan norma di masyarakat juga memiliki andil dalam terbentuknya konstruksi tersebut.

Masyarakat menjadikan pedoman agama sebagai penentu struktur gender sosial di masyarakat. Seperti dalam Surat An-Nisa' ayat 34, masyarakat memiliki makna bahwa sumber adanya penentuan posisi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan berasal dari surat tersebut. Dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada larangan perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti dalam Al-Hujurat (49): (01) dan QS An-Nisa (04) : (01), serta beberapa cerita dalam agama yang menjelaskan tentang kesetaraan dalam kehidupan. (Ja'far, 1998:45-48).

Kemenangan yang didapatkan oleh Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati tidak mengisyaratkan adanya transformasi ideologi atau pandangan gender dari patriarkhi ke egalitarian. Melainkan, adanya beberapa faktor yang bersifat mendasar dan memaksa bahwa masyarakat harus memilih Hj. Mundjidah Wahab sebagai bupati dalam pilkada Jombang. Faktor yang mendasar dan memaksa tersebut dari adanya keuntungan yang dimiliki Hj. Mundjidah sebagai anak kyai tersohor di Indonesia yang juga merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama.

PENUTUP

Simpulan

Masyarakat sekitar pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras berpandangan patriarkhi dalam mengonstruksi pemimpin. Masyarakat memandang bahwa laki-laki merupakan individu yang mempunyai kelayakan untuk memimpin dan dipilih sebagai pemimpin. Pandangan tersebut didapatkan dari pemahaman agama dan pengalaman individu dalam dunia sosialkultural. Masyarakat melihat bahwa pemimpin perempuan tidak sesuai dengan ajaran dari agama Islam (Surat an-Nisa' ayat 34), pemimpin perempuan menyalahi kodrat (penempatan perempuan yang selalu di ranah domestik) dan pemimpin perempuan tidak tegas dan lemah.

Kemenangan Hj. Mundjidah Wahab tidak mencerminkan terjadinya perubahan pandangan gender. Status yang tinggi sebagai anak dari kyai tersohor dan pendiri Nahdlatul Ulama menjadikan seluruh suara elemen terarah ke Mundjidah serta membatunya untuk memenangkan kursi tertinggi dalam pemerintahan Jombang. Terjadi peristiwa paradoks antara interpretasi yang didapatkan dari agama, yaitu surat An-Nisa' ayat 34 dengan tindakan beberapa individu yang justru memilih perempuan yaitu Mundjidah sebagai bupati atau pemimpin dengan alasan bahwa bupati merupakan pemimpin pada tahap rendah, kekerabatan sosial, balas budi dan latar belakang keluarga yang memiliki status sosial tinggi.

Saran

Beberapa saran yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah. (1) Bagi kyai atau pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, dalam dakwah atau ceramahnya perlu untuk mengangkat isu-isu gender dalam pengajian yang dilakukan di pondok pesantren. Mislanya tentang hak dan hukum kepemimpinan perempuan di sektor publik. (2) Bagi pemerintah desa Tambak Rejo, perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren seperti kegiatan milad pondok. Karena dengan dukungan tersebut dapat memberikan dampak kepada masyarakat bahwa kegiatan pondok juga salah satu kegiatan mereka, sehingga tercipta ruang diskusi dalam interpretasi gender dalam agama. (3) Bagi masyarakat, perlu diadakan diskusi rutin untuk membahas berbagai persoalan yang masih menjadi perdebatan pro-kontra dalam masyarakat misalnya tentang kepemimpinan perempuan dan sebaiknya masyarakat sekitar pondok pesantren lebih kritis dalam memahami interpretasi dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anni, Catharina Tri dan Achmad Rifa'i. 2011. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: UNNES Press.
- Astuti, Pudji. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ja'far, Qasim. 1998. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Marhumah, Ema. 2011. *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKiS.
- Maula, Atiqotul. 2016. *Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mosse, Julia Cleves. 2007 *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women Crisis Centre dengan Pustaka Belajar.
- Mulia, Siti M, dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Parera, Frans M. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: Unit Percetakan LP3ES.
- Raohmaniyah, Inayah. 2009. "Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama". *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 10 (2): hal. 208-230.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- (<http://nahdlatululama.id/blog/2017/04/24/pesantren-bahrul-ulum-tambak-beras/diakses> pada tanggal 2 Januari 2019/)